



Analisis Penerapan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan di SDN 195/VI Pematang Kancil

Irsyad Maulana¹, Leoni Putri Metriani², Fizza Syahira³, Yantoro⁴, Bradley Setiyadi⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: irsyadwae05@gmail.com, leoniputri0110@gmail.com, sfizza@gmail.com,
yantoro@unja.ac.id, bradleysetiyadi@unja.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-07-12 Revised: 2023-08-22 Published: 2023-09-01	Decentralization of education is the administration of autonomy in the field of education. Education is one of the rights that can be taken by all people in Indonesia. Because, in this case to advance a nation needed a capital in the form of investment. The most important investment in life is an investment related to education from an early age. The aim is to analyze the implementation of autonomy and decentralization of education at SDN 195/VI Pematang Kancil. The writing of this article uses a qualitative type. The results obtained are the implementation of autonomy and decentralization of education so that it is carried out properly, especially those in SDN 195/VI Pematang Kancil carried out in several ways, including providing scholarship funds to students who need them, such as disadvantaged children, setting an appropriate budget with educational problems and implementation related to educational formulations in a transparent and fair manner, there are no acts of discrimination and implementing a fair education system, needs related to facilities and infrastructure are met, students who experience dropping out of school are reduced, and there is pure participation. The conclusion is that in SDN 195/VI the educational autonomy and decentralization activities have five components including resources, structure and planning, teacher management, and teaching and learning organization and processes.
Keywords: <i>Decentralization; Autonomy; Education.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-07-12 Direvisi: 2023-08-22 Dipublikasi: 2023-09-01	Desentralisasi pendidikan merupakan penyelenggaraan otonomi di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak yang bisa diambil oleh semua masyarakat di Indonesia. Sebab, dalam hal ini untuk memajukan suatu bangsa diperlukan sebuah modal berupa investasi. Investasi paling utama dalam kehidupan adalah investasi terkait pendidikan sejak dini. Tujuannya adalah menganalisis terkait penerapan otonomi dan desentralisasi pendidikan di SDN 195/VI Pematang Kancil. Penulisan artikel ini menggunakan jenis kualitatif. Hasil yang didapatkan adalah penerapan otonomi dan desentralisasi pendidikan agar terlaksana dengan baik, khususnya yang terdapat di SDN 195/VI Pematang Kancil dilakukan beberapa cara, diantaranya adalah memberikan dana beasiswa kepada siswa-siswi yang membutuhkannya, seperti anak yang kurang beruntung, menetapkan anggaran yang sesuai dengan permasalahan pendidikan serta adanya penerapan terkait formulasi pendidikan secara transparan dan adil, tidak ada tindakan diskriminasi dan menerapkan sistem pendidikan yang adil, kebutuhan terkait sarana dan prasarana dipenuhi, siswa-siswi yang mengalami putus sekolah dikurangi, dan adanya partisipasi murni. Kesimpulannya adalah di SDN 195/VI kegiatan otonomi dan desentralisasi pendidikan terdapat lima komponen diantaranya adalah sumber daya, struktur dan perencanaan, manajemen guru, serta organisasi dan proses belajar mengajar.
Kata kunci: <i>Desentralisasi; Otonomi; Pendidikan.</i>	

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi pendidikan merupakan penyelenggaraan otonomi di bidang pendidikan (Setyaningsih, 2017). Pendidikan merupakan salah satu hak yang bisa diambil oleh semua masyarakat di Indonesia. Sebab, dalam hal ini untuk memajukan suatu bangsa diperlukan sebuah modal berupa investasi. Investasi paling utama dalam kehidupan adalah investasi terkait pendidikan sejak dini (Fajar & Mulyanti, 2019).

Otonomi daerah tercatat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tuharea, 2017). Jenis desentralisasi pendidikan terdapat dua, yaitu desentralisasi pendidikan yang memberikan wewenang kepada sekolah dan desentralisasi yang memberikan beberapa hal kebijakan dan dana yang diterima oleh sekolah dari pemerintah (Simanjuntak, 2015).

Pada kegiatan otonomi dan desentralisasi pendidikan terdapat lima komponen diantaranya

adalah sumber daya, struktur dan perencanaan, manajemen guru, serta organisasi dan proses belajar mengajar (Ridwan & Sumirat, 2021). Tipologi dari komponen-komponen tersebut tentu memiliki kewenangan masing-masing yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Komponen sumber daya memiliki kewenangan dalam alokasi anggaran (pelatihan guru, non-personel, dan personel atau tenaga administrasi) dan program pengembangan sekolah (Kharisma, 2013). Selanjutnya untuk struktur perencanaan memiliki kewenangan berupa kinerja sekolah kena diawasi, pendefinisian dari metpel (mata pelajaran), penentuan beberapa program dari penawaran sekolah, dan pembukaan ataupun penutupan sekolah. Selanjutnya untuk komponen manajemen guru juga memiliki kewenangan, diantaranya adalah pemberian serta penentuan dari adanya pelatihan tenaga pendidik, tanggungjawab mengajar diberikan kepada guru, penentuan gaji guru, pemberhentian dan pemilihan tenaga pendidik, dan pemberhentian ataupun pemilihan kepala sekolah (Pane, 2021). Kemudian untuk komponen organisasi dan proses belajar mengajar juga memiliki beberapa kewenangan, diantaranya adalah penentuan metode pembelajaran, kurikulum, menentukan buku teks, pemilihan waktu belajar di sekolah, dan penentuan sekolah yang bisa diikuti oleh siswa-siswi (Saifulloh & Darwis, 2020).

Pada observasi yang dilakukan di SDN 195/VI Pematang Kancil didapatkan data bahwa sudah dilaksanakannya kegiatan otonomi dan desentralisasi dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, meskipun sudah dilakukan, sebagai kegiatan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian setelah dilakukan analisis lebih lanjut, faktor utama yang mempengaruhi terkait tidak maksimalnya implementasi otonomi dan desentralisasi di SDN 195/VI Pematang Kancil komponen sumber daya yang memiliki kewenangan dalam pengembangan sekolah. Pada SDN 195/VI lebih terfokuskan kepada pemberian pembelajaran kepada para siswa-siswi, sehingga dengan harapan para siswa-siswi yang akan menjadi alumni dapat menjadi siswa yang berprestasi dan bisa memberikan keberuntungan bagi negara ataupun bangsa. Akan tetapi, dalam hal ini, sebaiknya semua komponen dapat dapat terlibat aktif, sehingga otonomi serta desentralisasi pendidikan di SDN 195/VI Pematang Kancil bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi.

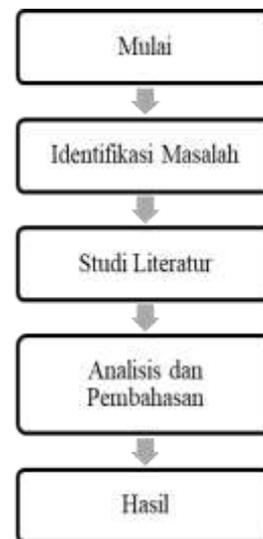
Pada penelitian Wardayana (2018) menjelaskan desentralisasi pendidikan merupakan

penyelesaian masalah di dalam pendidikan serta dapat mengambil keputusan dan membuat perencanaan sebagai pelibatan wewenang. Tujuan dari desentralisasi pendidikan juga harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Latar belakang dari adanya desentralisasi pendidikan adalah pada daerah tertentu tentu mengetahui terkait aspirasi, permasalahan, potensi, serta kondisi daerahnya sendiri. Begitu pula dengan sekolah, sehingga dalam hal ini, sekolah harus bisa menentukan beberapa langkah yang serta pengambilan keputusan maupun kebijakan agar sistem pendidikan di sekolah bisa berjalan dengan sempurna.

Berdasarkan dari paparan diatas penulis menuliskan judul "Analisis Penerapan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan di SDN 195/VI Pematang Kancil. Tujuannya adalah menganalisis terkait penerapan otonomi dan desentralisasi pendidikan di SDN 195/VI Pematang Kancil.

II. METODE PENELITIAN

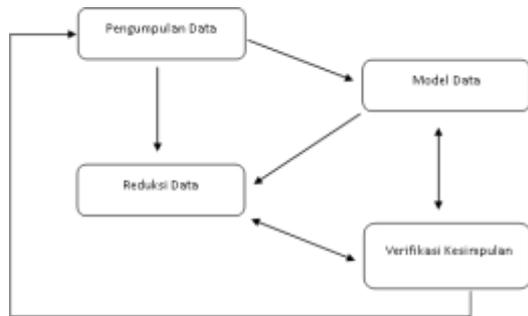
Penulisan artikel ini menggunakan jenis kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini memfokuskan pada kajian data kualitatif. Meskipun penelitian ini difokuskan pada kajian kualitatif, jika peneliti menemukan kajian data-data kuantitatif, maka keberadaan tersebut tentu dilibatkan. Gambar dibawah ini memaparkan diagram alir penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Berfikir Peneliti
Sumber: Rumatna, 2018

Pendekatan yang dilibatkan pada penelitian ini meliputi histori, pendagogi, dan sosiologi. Adapun pengembangan instrumen penelitian ini adalah kata kunci. Peneliti sendiri yang mengembangkan terkait adanya kata kunci, meliputi

pengamatan/observasi, literature review, dan juga dokumentasi. Tahap pengumpulan data dilakukan terkait penerapan otonomi dan desentralisasi pendidikan di SDN 195/VI Pematang Kancil. Setelah dilakukan tahap pengumpulan data, selanjutnya tahap artikulasi yang dirujuk pada beberapa fakta pendukung penelitian ini. Sebuah pengetahuan baru akan dihasilkan oleh pemaparan fakta-fakta hasil penelitian yang telah dilakukan analisis data dengan kritis dan cermat. Tahap analisis data dilakukan secara deduktif atau induktif yang bisa memaparkan conclusion (kesimpulan). Analisis data yang dilakukan bisa dipaparkan dalam Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Analisis Data

Sumber: Miles & Huberman, 1992

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berikut adalah Tabel 1 yang memaparkan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan melalui kajian kepustakaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian

No.	Judul/Tujuan/Penulis	Hasil Analisis
1.	"Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu (Studi Kasus pada Sekolah Dasar Inpres Bumi Bahari)". Bertujuan dalam menganalisis terkait penerapan desentralisasi pada SD. (Wardayana, 2018).	Pada penelitian tersebut menjelaskan desentralisasi pendidikan merupakan penyelesaian masalah di dalam pendidikan serta dapat mengambil keputusan dan membuat perencanaan sebagai pelibahan wewenang. Tujuan dari desentralisasi pendidikan juga harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Latar belakang dari adanya desentralisasi pendidikan adalah pada daerah tertentu tentu mengetahui terkait aspirasi, permasalahan, potensi, serta kondisi daerahnya sendiri. Begitu pula dengan sekolah, sehingga dalam hal ini, sekolah harus bisa menentukan

		beberapa langkah yang serta pengambilan keputusan maupun kebijakan agar sistem pendidikan di sekolah bisa berjalan dengan sempurna.
2.	"Desentralisasi Manajemen Sarana dan Prasarana". Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan terkait penerapan desentralisasi manajemen (Lestari & Effane, 2023).	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa mutu pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan melalui adanya desentralisasi pendidikan. Peran desentralisasi dalam bidang pendidikan adalah kreativitas guru dan staff dapat ditingkatkan, memberikan pengalaman terhadap pelatihan dalam mengambil keputusan. Desentralisasi pendidikan merupakan penyelenggaraan otonomi di bidang pendidikan. Ada berbagai macam model desentralisasi pendidikan, salah satu contohnya adalah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Menurut penelitian tersebut juga dibuktikan bahwa otonomi sekolah juga dapat ditingkatkan oleh MBS.
3.	"Desentralisasi Pendidikan". Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji terkait desentralisasi di bidang pendidikan (Zilva, 2016).	Sistem desentralisasi pendidikan pada sekolah dasar menyelenggarakan kegiatan otonomi sebagai desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan akan berjalan dengan baik, jika permasalahan dalam kurikulum, kesenjangan, fasilitas, masalah guru, relevansi, pemerataan, dan masalah mutu mendapatkan penanganan yang baik.
4.	"Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara". Bertujuan dalam menganalisis terkait penerapan kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan (Obed, 2021).	Kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan latar belakang masalah dari setiap sekolah tentu berbeda. Hasil dari penelitian tersebut memaparkan "Proses kebijakan pendidikan pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pola kebijakan pemerintahan sentralistik. Pola kebijakan desentralisasi sebagai bagian dari kebijakan politik yang berkembang di daerah pada realitasnya tidak berjalan efektif karena dominasi elit lokal di daerah sehingga pemerintah daerah rawan

terhadap fenomena elite capture di mana kepentingan elit lebih mendominasi proses politik”.

B. Pembahasan

Desentralisasi pendidikan adalah suatu hal yang kompleks, dikarenakan (1) menciptakan berbagai macam bentuk kebijakan yang konkret dalam sistem pendidikan, (2) melalui kebudayaan setempat dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan sistem pendidikan, (3) penyusunan kurikulum yang berkeseesuaian, (4) adanya sistem pelatihan terkait SDM disekolah, misalnya staff, guru, ataupun teknisi lapangan, dan (5) pengaturan terkait SDM dan manfaatnya. Berdasarkan hasil penelitian oleh Lestari & Effane (2023) memaparkan hasil bahwa mutu pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan melalui adanya desentralisasi pendidikan. Peran desentralisasi dalam bidang pendidikan adalah kreativitas guru dan staff dapat ditingkatkan, memberikan pengalaman terhadap pelatihan dalam mengambil keputusan. Desentralisasi pendidikan merupakan penyelenggaraan otonomi di bidang pendidikan. Ada berbagai macam model desentralisasi pendidikan, salah satu contohnya adalah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Menurut penelitian tersebut juga dibuktikan bahwa otonomi sekolah juga dapat ditingkatkan oleh MBS.

Jenis desentralisasi pendidikan terdapat dua, yaitu desentralisasi pendidikan yang memberikan wewenang kepada sekolah dan desentralisasi yang memberikan beberapa hal kebijakan dan dana yang diterima oleh sekolah dari pemerintah. Pada penelitian Wardayana (2018) menjelaskan desentralisasi pendidikan merupakan penyelesaian masalah di dalam pendidikan serta dapat mengambil keputusan dan membuat perencanaan sebagai pelibahan wewenang. Tujuan dari desentralisasi pendidikan juga harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Latar belakang dari adanya desentralisasi pendidikan adalah pada daerah tertentu tentu mengetahui terkait aspirasi, permasalahan, potensi, serta kondisi daerahnya sendiri. Begitu pula dengan sekolah, sehingga dalam hal ini, sekolah harus bisa menentukan beberapa langkah yang serta pengambilan keputusan maupun kebijakan agar sistem pendidikan di sekolah bisa berjalan dengan sempurna.

Beberapa kebijakan yang didasarkan pada otonomi dan desentralisasi pendidikan, diantaranya adalah (1) memberikan dana beasiswa kepada siswa-siswi yang membutuhkannya, seperti anak yang lambat belajar, cacat, dan anak yang kurang beruntung lainnya, (2) menetapkan anggaran yang sesuai dengan permasalahan pendidikan serta adanya penerapan terkait formulasi pendidikan secara transparan dan adil, (3) tidak ada tindakan diskriminasi dan menerapkan sistem pendidikan yang adil, (4) kebutuhan terkait sarana dan prasarana dipenuhi, (5) siswa-siswi yang mengalami putus sekolah dikurangi, dan (6) adanya partisipasi murni.

Sistem desentralisasi pendidikan pada sekolah dasar menyelenggarakan kegiatan otonomi sebagai desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan akan berjalan dengan baik, jika pemasalahan dalam kurikulum, kesenjangan, fasilitas, masalah guru, relevansi, pemerataan, dan masalah mutu mendapatkan penanganan yang baik (Zilva, 2016). Kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan latar belakang masalah dari setiap sekolah tentu berbeda. Hasil dari penelitian tersebut memaparkan “Proses kebijakan pendidikan pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pola kebijakan pemerintahan sentralistik. Pola kebijakan desentralisasi sebagai bagian dari kebijakan politik yang berkembang di daerah pada realitasnya tidak berjalan efektif karena dominasi elit lokal di daerah sehingga pemerintah daerah rawan terhadap fenomena elite capture di mana kepentingan elit lebih mendominasi proses politik” (Obed, 2021).

Melalui kegiatan otonom ataupun desentralisasi, pengelolaan pendidikan haruslah dibangun meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah (1) efisiensi administrasi, (2) efisiensi keuangan, (3) relevansi dan mutu pendidikan dapat ditingkatkan, dan (4) memperluas serta pemeratakan akses pendidikan (Subijanto, 2020). Otonomi dan desentralisasi pendidikan tidak hanya sekedar berpaku pada anggaran atau keuangan. Akan tetapi, lebih melakukan kegiatan terkait reformasi pendidikan secara menyeluruh. Adapun pada kegiatan otonomi dan desentralisasi dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah (Syahputra, 2017). Kewenangan yang dimaksudkan

tersebut adalah manajemen proses belajar mengajar, pemilihan kepala sekolah, pendanaan, dan manajemen guru (Saifulloh & Darwis, 2020). Secara keseluruhan di SDN 195/VI kegiatan otonomi dan desentralisasi pendidikan terdapat lima komponen diantaranya adalah sumber daya, struktur dan perencanaan, manajemen guru, serta organisasi dan proses belajar mengajar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan otonomi dan desentralisasi pendidikan agar terlaksana dengan baik, khususnya yang terdapat di SDN 195/VI Pematang Kancil dilakukan beberapa cara, diantaranya adalah memberikan dana beasiswa kepada siswa-siswi yang membutuhkan, seperti anak yang lambat belajar, cacat, dan anak yang kurang beruntung lainnya, menetapkan anggaran yang sesuai dengan permasalahan pendidikan serta adanya penerapan terkait formulasi pendidikan secara transparan dan adil, tidak ada tindakan diskriminasi dan juga menerapkan sistem pendidikan yang adil, kebutuhan terkait sarana dan prasarana dipenuhi, siswa-siswi yang mengalami putus sekolah dikurangi, dan adanya partisipasi murni. Kesimpulannya adalah di SDN 195/VI kegiatan otonomi dan desentralisasi pendidikan terdapat lima komponen diantaranya adalah sumber daya, struktur dan perencanaan, manajemen guru, serta organisasi dan proses belajar mengajar.

B. Saran

Melalui jurnal ini, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya, untuk melanjutkan penelitian berbasis data kuantitatif. Selanjutnya disarankan kepada sumber daya manusia, khususnya yang terdapat di sekolah untuk dapat menerapkan otonomi serta desentralisasi serta prinsip-prinsip yang berkesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah masing-masing. Kemudian disarankan untuk seluruh pembaca untuk meningkatkan ilmu pengetahuan lebih kritis dan mendalam lagi terkait otonomi dan desentralisasi pendidikan di sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228-248.

Fajar, C. M., & Mulyanti, D. (2019). Meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan melalui perencanaan investasi pendidikan. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 89-95.

Kharisma, B. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi: sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 101-119.

Lestari, W. D., & Effane, A. (2023). Desentralisasi Manajemen Sarana Prasarana. *KARIMAH TAUHID*, 2(1), 157-159.

Pane, D. (2021). *Analisis Manajemen Berbasis Sekolah, Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru Di Smp Swasta Pemda Rantau Prapat* (Doctoral dissertation).

Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).

Rumetna, M. S. (2018). Pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis: studi literatur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 5(3), 305-314.

Saifulloh, A. M., & Darwis, M. (2020). Manajemen pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di masa pandemi covid-19. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 3(2), 285-312.

Saifulloh, A. M., & Darwis, M. (2020). Manajemen pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di masa pandemi covid-19. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 3(2), 285-312.

Setyaningsih, K. (2017). Esensi tranformasi sistem sentralisasi-desentralisasi pendidikan dalam pembangunan masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76-94.

Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di

- Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111-130.
- Subijanto, S. (2010). Prinsip-Prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(5), 532-549.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12-21.
- Tuharea, F. (2017). Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 7(1).
- Wardayana, W. (2018). *Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Palu (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Inpres Bumi Bahari)* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- Zilva, R. 2016. Desentralisasi Pendidikan: Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. *JOIES: Jurnal of Islamic Education Studies*, 1(1), 171-183.